

**KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah

Oleh:

**SALWA KAYATI**  
**I000060002**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 4/2004 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan peradilan tata Usaha.<sup>1</sup>

Peradilan Agama mendapatkan pengakuan ditandai dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49 yang dinamai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan hasil yang maksimal dan dapat mempekuat persatuan dan kedudukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilanpun demikian, akan lebih mudah dan kongkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu

---

1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang *Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

2 M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) Pustaka Kartini, Jakarta, 1997, hal.15.

atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>3</sup> dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Seperti kekuasaan (kewenangan) pada lembaga peradilan yang lain, maka kekuasaan peradilan agama terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*absolute competentie*). kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>5</sup>

Kewenangan absolut peradilan agama ini ditegaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama Bab III, yang mengatur tentang kekuasaan pengadilan terutama pasal 49, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,

---

3 Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

4 A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.9.

5 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.218-220

### 3. Wakaf dan shadaqah.<sup>6</sup>

Tanggal 30 Maret 2006, UU peradilan Agama diamandemen menjadi UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya amandemen ini dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan sistem satu atap (*one roof system*) yaitu pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Kemudian peradilan Agama juga mendapatkan kewenangan baru yang tertuang dalam pasal 49 yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. Perkawinan, | 6. Zakat,               |
| 2. Waris,      | 7. Infaq,               |
| 3. Wasiat,     | 8. Shadaqah,            |
| 4. Hibah,      | 9. dan Ekonomi Syari'ah |
| 5. Wakaf,      |                         |

Tambahan kewenangan khususnya dalam menangani perkara ekonomi syari'ah ini memang seyogyanya diberikan kepada Institusi Peradilan Agama seiring telah terjadinya perkembangan yang cukup pesat di bidang hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syari'ah.<sup>7</sup>

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam

---

<sup>6</sup> Undang-undang No.7 Tentang *Peradilan Agama*

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hal.79.

menyelesaikan perkara tertentu. Dengan peneguhan inipun hakim telah mempunyai semacam kekuatan dan senjata bila menangani perkara ekonomi syari'ah.

Lahirnya undang-undang ini dengan perluasan kewenangannya membuat kedudukan peradilan Agama semakin kuat. Disisi lain Pengadilan Agama selama ini hanya menangani masalah-masalah hukum keluarga saja. Melihat hal ini tentu perlu dipertanyakan kemampuan Pengadilan Agama khususnya hakim menangani perkara ekonomi syari'ah. Yang pada dasarnya hakim Pengadilan Agama umumnya tidak mempunyai background ilmu ekonomi Islam. Apalagi lingkup ekonomi syari'ah sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.<sup>8</sup> Hal ini yang membuat tugas Pengadilan Agama menjadi berat.

Semua kegiatan ekonomi syari'ah, dalam penerapannya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (*akad*) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (*akad*). untuk itu diperlukan lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syari'ah.

Dilihat dari sektor perbankan, pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah (LKS) di Indonesia sampai tahun 2007 semakin

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hal. 56.

menunjukkan grafik kenaikan yang cukup signifikan. Banyak beroperasinya lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah semakin menunjukkan geliat semangat ekonomi syari'ah masyarakat Indonesia.

Perkembangan kegiatan perekonomian syari'ah yang pesat, membuat peluang terjadinya sengketa juga sangatlah besar. Dengan perkembangan zaman yang ada membuat sengketa-sengketa semakin hari semakin rumit. Hal ini tentu harus di imbangi dengan kesiapan yang matang oleh lembaga yang akan menangani sengketa tersebut. Baik dari segi SDMnya ataupun sarana prasarannya.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dengan lahirnya UU No. 3/2006 membuat Pengadilan Agama khususnya hakim memikul tugas yang sulit. Disamping sebagai sebuah peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah bila dilihat minimnya pengetahuan hakim Pengadilan Agama tentang ekonomi syari'ah. Hakim harus mempertanggung jawabkan segala putusannya, tidak hanya di hadapan orang yang berperkara tetapi juga dihadapan sang khalik. Ketika seorang hakim tidak berkompeten dalam kewenangannya menyelesaikan perkara bisa saja putusannya salah dan mengakibatkan fatal. Dalam hadist dijelaskan bahwa seorang hakim apabila tidak mengetahui ilmunya dan tetap menghukum dengan kebodohan maka dia masuk di neraka. Adapun yang menarik dan perlu diangkat penulis adalah KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta).

## **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Agama maka untuk membatasi ruang lingkup dan memudahkan penelitian, maka penulis hanya membatasi masalah bagaimana Pengadilan Agama menyiapkan hakim-hakimnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Adanya pembatasan masalah ini diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat terarah serta sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif serta ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang dikaji dan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pengadilan Agama surakarta melaksanakan kompetensi absolut dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah?

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan kompetensi Pengadilan Agama Surakarta dalam menangani perkara ekonomi syari'ah.
- b. Untuk menjelaskan upaya-upaya hakim Pengadilan Agama Surakarta dan kendala-kendala yang dihadapi sebagai imbas dari adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara ekonomi syari'ah.

## 2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang kompetensi PA Surakarta dan berbagai kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Surakarta berkaitan dengan kesiapan menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta bahan acuan bagi peradilan Agama khususnya hakim-hakimnya.
- b. Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan study islam, khususnya di bidang hukum peradilan Agama di Indonesia.
- c. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dan dapat mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya.

## **E. Telaah Pustaka**

Perluasan kompetensi peradilan Agama, khususnya kompetensi absolut merupakan hal yang masih baru dan menarik. Sepanjang pengamatan penyusun



masih jarang karya ilmiah atau tulisan-tulisan yang membahas secara spesifik tentang kewenangan peradilan Agama, terutama karena amandemen undang-undang masih baru.

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 tahun 2006 ” bahwa selama ini Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga. Sehingga dibutuhkan beberapa langkah konkrit dalam menyongsong adanya perluasan kewenangan peradilan Agama, khususnya mengenai hukum materiil di bidang ekonomi syari'ah, kesiapan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.<sup>9</sup> Selain itu Menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul “hukum ekonomi syari'ah” menjelaskan tentang ekonomi syari'ah diantaranya pengertian ekonomi syari'ah dan sistem ekonomi syari'ah.

Kemudian skripsi yang berhubungan dengan kewenangan absolut peradilan Agama yaitu karya Siti Juhaeriyah yang berjudul “ Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama”<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Agama di dalam menyelesaikan perkara perceraian yang salah satu pihak berpindah Agama. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penyusun teliti yaitu masalah perceraian yang menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedang skripsi penyusun adalah membahas kompetensi hakim terhadap salah satu kewenangan absolut

---

9 Abdul Ghofur Anshori, *peradilan Agama di indonesia pasca undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hal. 5.

10 Siti Juhaeriyah, *Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama*, Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta, 1999, skripsi tidak diterbitkan.

Pengadilan Agama yang lain yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya di atas maka sejauh pengetahuan penyusun belum ditemukan literatur yang secara spesifik membahas tentang kompetensi hakim menangani masalah ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk menulisnya dalam bentuk skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian, bahwa kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data dan alat pengukurnya<sup>11</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Surakarta, dan fokus studi yang dikaji berkisar pada persiapan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Surakarta. Serta upaya hakim-hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam mempersiapkan diri menghadapi masalah ekonomi syariah.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada,

---

11 Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal.84.

yang akhirnya diambil kesimpulan (Jujun S. Suriasumantri, 1994:194). Berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai kompetensi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Surakarta terkait dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Serta upaya-upaya hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam mempersiapkan diri menghadapi perkara ekonomi syari'ah, baru kemudian dianalisa secara terperinci.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam (*indepth interview*) yaitu untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab yang berupa wawancara dengan ketua dan hakim-hakim Pengadilan Agama Surakarta.
- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, buku-buku, hasil penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### 4. Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syari'at Islam.<sup>12</sup>
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan titik tolak pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

12 Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal. 142.

## 5. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>13</sup>

metode yang dipakai dalam menganalisis data pada skripsi ini adalah induktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum(Hadi,1987:42). Dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yaitu langkah yang diambil dalam mempersiapkan hakim-hakimnya dan kendala-kendala yang dihadapi PA Surakarta serta upaya hakimnya dalam menghadapi kewenangan menangani ekonomi syari'ah. Kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum sesuai topik yang diteliti.

## G.Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi ke dalam empat bab dengan tambahan satu bab sebagai kesimpulan. Bab-bab tersebut di setiap babnya terdiri dari sub bab, yaitu antara bab satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini akan tersusun suatu pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan berisi pemaparan tentang garis besar isi penelitian, yaitu meliputi latar belakang masalah, pembatasan

---

13 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hal.205.

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan umum tentang kompetensi peradilan Agama tentang ekonomi syari'ah. Pada sub bab pertama dijelaskan tentang kompetensi peradilan Agama untuk gambaran awal bahasan skripsi ini. Yaitu pengertian dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif peradilan agama. Pada sub bab kedua diuraikan tentang ekonomi syari'ah. yang terbagi menjadi dua sub bab, yaitu menguraikan sistem ekonomi syari'ah dan tentang ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan baru di Peradilan Agama.

Bab ketiga merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada bab kedua mengenai profil Pengadilan Agama Surakarta dan kompetensi hakim Peradilan Agama Surakarta menghadapi perkara ekonomi syari'ah. Pada sub bab pertama tentang deskripsi Pengadilan Agama Surakarta, karena hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Dalam sub bab ini juga dijelaskan tentang profil hakim-hakim yang ada sebagai unsur terpenting Pengadilan Agama. Pada sub bab kedua diuraikan bagaimana Pengadilan Agama Surakarta melaksanakan kompetensi menghadapi perkara ekonomi syari'ah yang akan terbagi menjadi tiga bagian pembahasan. Yang pertama menguraikan kebijakan Pengadilan Agama Surakarta dalam menangani perkara ekonomi syari'ah. Kemudian yang kedua diuraikan upaya-upaya hakim Pengadilan Agama Surakarta mempersiapkan diri menghadapi perkara ekonomi syari'ah. Yang ketiga menguraikan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Surakarta dalam

mempersiapkan hakim-hakimnya dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.

Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, penyusun melanjutkan pada bab keempat yang merupakan analisis terhadap kompetensi hakim peradilan agama Surakarta menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. setelah pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis terhadap kebijakan PA Surakarta dalam menyiapkan diri dan hakimnya dalam menyongsong kewenangan baru serta kendala yang terjadi. Kemudian pada sub selanjutnya juga menganalisis upaya-upaya yang dilakukan hakim-hakim PA Surakarta dalam menyiapkan diri menghadapi tugas yang baru yaitu menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini dengan bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.